

Strategi Konfrontatif Rusia Melalui Kebijakan Operasi Militer Khusus ke Ukraina Hafid Adim Pradana^{1*}, Ubaidah Adielah²

*Corresponding Author: adimhafid@umm.ac.id

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i2.23258

Abstract

This study aims to explain the background of the special military operation carried out by Russia against Ukraine. The special military operation launched by Russia against Ukraine made Russia accept various economic and political pressures from Western countries. The many negative impacts that Russia has had after the policy of a special military operation against Ukraine at first glance shows that Russia's actions are something that seems irrational. By using the theory of strategy in policy making formulated by John P. Lovell and the causal explanation method, this research results in the finding that the special military operations policy set by Vladimir Putin is a manifestation of the implementation of a confrontational Russian strategy based on two things, namely: the perception of threats to Ukraine's intention to join NATO and the superiority of Russia's capabilities over Ukraine.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan latar belakang operasi militer khusus yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Operasi militer khusus yang dilancarkan oleh Rusia terhadap Ukraina membuat Rusia menerima berbagai tekanan ekonomi dan politik dari negara-negara Barat. Jika melihat pada banyaknya dampak negatif yang didapatkan Rusia pasca kebijakan operasi militer khusus ke Ukraina, maka dapat dikatakan bahwa keputusan Rusia tersebut merupakan suatu tindakan yang tampak tidak rasional. Dengan menggunakan teori strategi dalam pengambilan kebijakan yang dirumuskan oleh John P. Lovell dan metode causal explanation, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kebijakan operasi militer khusus yang ditetapkan oleh Vladimir Putin merupakan wujud dari penerapan strategi konfrontatif Rusia yang didasari oleh dua hal yaitu: persepsi ancaman terhadap niatan Ukraina bergabung dengan NATO dan superioritas kapabilitas Rusia atas Ukraina.

Keywords

Operasi Militer Khusus, Rusia, Strategi Konfrontatif, Ukraina

Article History

Received September, 30

Revised November, 15

Accepted December, 28

Published December, 30

Corresponding Author

Hafid Adim Pradana.
Program Studi Hubungan
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Malang.
Jl. Raya Tlogomas No. 246, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa
Timur. 65144.

Pendahuluan

Pada 24 Februari 2022, Presiden Vladimir Putin melancarkan tindakan operasi militer khusus ke Ukraina. Seiring waktu, kebijakan Presiden Rusia tersebut mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Hingga bulan Desember 2022, terdapat lebih dari 7000 korban jiwa (Yuniar, 2023). Operasi militer khusus ke Ukraina yang dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin memunculkan banyak kecaman dan berbagai sanksi ekonomi terhadap Rusia, khususnya dari negara-negara Barat. Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara yang paling awal memberikan sanksi terhadap Rusia. Sanksi yang diberikan oleh AS menasar empat bank Rusia dan memotong lebih dari setengah impor teknologi Rusia, serta melarang perusahaan energi Gazprom beserta 12 perusahaan besar lainnya untuk mengambil utang atau menambah modal lewat pasar keuangan global. Selain AS, Uni Eropa (UE) juga turut serta memberikan sanksi kepada Rusia. Hingga awal bulan Desember 2022, UE telah memberikan sembilan paket sanksi terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin (cnn.com, 2022).

Berbagai sanksi yang diberikan oleh negara-negara Barat pada gilirannya membuat Rusia mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas perdagangan dengan negara-negara Barat. Padahal negara-negara Barat, khususnya UE merupakan salah satu importir terbesar gas alam Rusia. Selain itu, sanksi yang diterima Rusia juga membuat warga Rusia yang sedang berada di luar negaranya mengalami kesulitan ketika menarik uang di luar negeri (Kompas.com, 2022). Jika melihat pada banyaknya dampak negatif yang didapatkan Rusia pasca kebijakan operasi militer khusus ke Ukraina, maka dapat dikatakan bahwa keputusan Rusia tersebut merupakan suatu tindakan yang tampak tidak rasional. Oleh karena itu, tulisan ini berfokus untuk menjelaskan alasan Rusia dalam menjalankan kebijakan operasi militer khusus ke Ukraina pada Februari 2022.

Relasi konflikual antara Rusia dan Ukraina sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sehingga, tidak sedikit riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan hubungan antara dua negara bekas Uni Soviet tersebut. Salah satu diantaranya ialah artikel jurnal dari Ali Muhammad yang berupaya menjelaskan kepentingan Rusia di Eropa Timur beserta korelasinya dengan hubungan Rusia dan negara-negara Barat. Berdasarkan temuan Muhammad, berbagai intervensi politik Rusia di negara-negara Eropa Timur tidak dapat dilepaskan dari semakin mendekatnya negara-negara Eropa Timur ke dalam blok politik negara-negara Barat. Bagi Rusia, kedekatan negara-negara Eropa Timur dengan Barat merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan. Terlebih jika negara-negara Eropa Timur, khususnya Ukraina turut tergabung dalam *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Bagi negara-negara Barat, tindakan intervensi politik Rusia di negara-negara bekas Uni Soviet merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Sehingga, pada gilirannya negara-negara Barat memberikan tekanan politik maupun ekonomi terhadap Rusia. Hal ini kemudian berujung pada semakin memanasnya hubungan Rusia dengan negara-negara Barat, yang oleh Muhammad disebut sebagai “Perang Dingin Baru” (Muhammad, 2015).

Selain berfokus pada relasi Rusia dengan negara-negara Barat, pada penelitian berikutnya, Muhammad bersama dengan Athifi berupaya menjelaskan kedekatan hubungan Rusia-Tiongkok seiring dengan buruknya hubungan pemerintahan Vladimir Putin dengan negara-negara Barat. Dalam artikel jurnal yang mereka tulis tersebut, terdapat temuan bahwa sanksi negara-negara Barat atas Rusia dinilai tidak efektif. Alih-alih memperlemah Rusia, berbagai sanksi yang dilancarkan negara-negara Barat justru semakin memperkuat hubungan strategis Rusia dengan Tiongkok. Penguatan hubungan ekonomi dan militer antara Rusia dan Tiongkok tentunya bukan merupakan suatu hal yang diharapkan oleh Barat (Muhammad & Athifi, 2021).

Sedikit berbeda dengan dua penelitian terdahulu sebelumnya, artikel jurnal yang ditulis Lingga Ayudhia, Yuniarti, dan Rendy Wirawan menjelaskan mengenai keterlibatan Amerika Serikat sebagai *intrusive system* dalam konflik Rusia dan Ukraina. Dalam tulisan mereka, didapati temuan bahwa tindakan aneksasi yang dilakukan Rusia terhadap Krimea membuat AS memberikan respon berupa tekanan ekonomi dan politik terhadap Rusia. Selain itu, AS juga memberikan dukungan ke Ukraina dalam bentuk bantuan dana untuk pelatihan militer sebesar \$3,7 miliar. Dukungan AS tersebut bertujuan agar Ukraina dapat merebut kembali wilayah Krimea (Ayudhia, Yuniarti, & Wirawan, 2022). Riset lain yang mengkaji keterlibatan *intrusive system* di Eropa Timur ialah artikel jurnal URNM Hanifah yang membahas tentang sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia sebagai respon aneksasi Krimea. Dalam tulisannya, Hanifah menyimpulkan bahwa pemberian sanksi UE merupakan wujud strategi konfrontatif terhadap Rusia. Strategi konfrontatif UE didasari oleh pandangan UE yang melihat Rusia sebagai

ancaman. Selain itu UE juga percaya diri akan kapabilitasnya yang lebih tinggi dari Rusia (Hanifah, 2017).

Seperti halnya beberapa penelitian di atas, tulisan ini berada dalam cakupan tema besar relasi konfliktual Rusia dan Ukraina. Hanya saja, sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, fokus tulisan ini lebih mengarah pada penjelasan yang melatarbelakangi tindakan Rusia dalam melakukan operasi militer khusus ke Ukraina. Guna menjelaskan kebijakan Rusia tersebut, tulisan ini menggunakan teori strategi dalam pengambilan kebijakan yang dirumuskan oleh John P. Lovell. Dalam pandangan Lovell, pilihan strategi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain ditentukan oleh dua faktor, yaitu persepsi mengenai strategi kebijakan luar negeri atau posisi politik negara lain serta pandangan tentang perbandingan estimasi kapabilitas yang dimiliki dengan kapabilitas negara lain. Dengan demikian terdapat empat jenis strategi kebijakan luar negeri yang dapat diterapkan oleh suatu negara. Keempat jenis strategi tersebut meliputi *Leadership*, *Concordance*, *Accommodation*, dan *Confrontation Strategy* (Lovell, 1970).

Leadership Strategy merupakan suatu strategi di mana suatu negara menganggap kapabilitas negaranya lebih tinggi dari negara lain serta menganggap negara lain mendukung tujuan nasionalnya. Jadi dalam strategi ini suatu negara akan banyak menerapkan strategi persuasi serta tawar menawar dengan negara lain. Sementara itu, *Concordance Strategy* ialah suatu strategi yang diterapkan dimana suatu negara merasa kapabilitas negaranya lebih rendah dari negara lain dan menganggap negara lain sebagai pendukung dari tujuan nasional negaranya. Maka dalam strategi ini terdapat hubungan yang saling menguntungkan dimana negara dengan kapabilitas rendah akan berusaha untuk mengambil kebijakan yang tidak menimbulkan konflik antar negara.

Adapun *Accommodation Strategy* merupakan suatu strategi yang diterapkan suatu negara di mana negara tersebut menganggap kapabilitas negaranya lebih rendah daripada kapabilitas negara lain, serta memiliki anggapan bahwa negara lain tersebut menjadi ancaman bagi negaranya. Maka negara akan menerapkan strategi akomodasi atau penyesuaian-penyesuaian terhadap negara lawan. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik yang dapat merugikan negaranya karena kapabilitas negaranya lebih rendah dari negara lawan. Sedangkan *Confrontation Strategy* ialah strategi yang diterapkan oleh suatu negara di mana negara tersebut memiliki anggapan bahwa kapabilitasnya lebih tinggi daripada negara lain serta adanya persepsi yang melihat negara lain merupakan ancaman bagi tujuan nasional negaranya. Dalam situasi ini negara akan menerapkan tindakan yang dapat menimbulkan konflik serta memaksa negara lain untuk mengakui kapabilitas negaranya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode *causal explanation*, yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan penyebab dari fenomena yang diamati (Silalahi, 2009). Dalam metode *causal explanation*, terdapat dua variabel yang terdiri dari variabel dependen atau unit analisa maupun variabel independen atau unit eksplanasi. Unit analisa ialah fenomena yang hendak dijelaskan atau dianalisa. Sedangkan unit eksplanasi ialah perilaku yang hendak diamati, yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena yang dianalisa (Mas'ood, 1990). Sederhananya, unit eksplanasi berfungsi sebagai penjelas dari unit analisa. Dalam penelitian ini strategi konfrontatif Rusia dalam bentuk kebijakan operasi militer khusus terhadap Ukraina berfungsi sebagai unit analisa. Adapun

unit eksplanasi dalam penelitian ini meliputi pandangan Rusia mengenai superioritas kapabilitas yang mereka miliki dan persepsi ancaman terhadap Ukraina.

Berkaitan dengan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau metode pengumpulan data yang berbasis pada dokumen (Bakry, 2016). Dalam studi kepustakaan, data-data yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat akan ditelusuri melalui penelaahan terhadap buku, artikel jurnal, serta berita media cetak dan elektronik. Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap. Pertama, data yang tersebar dari berbagai sumber literatur, dibaca dan ditelaah dengan seksama untuk dijadikan acuan berfikir serta mencari solusi yang tepat, dan pada penelitian lebih lanjut diharapkan menghasilkan hasil data yang valid. Selanjutnya, data yang telah terseleksi, direduksi sehingga tersusun secara sistematis guna memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap fenomena yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Relasi Konflikual Rusia-Ukraina

Secara historis relasi konflikual Rusia dan Ukraina bermula dari pecahnya Uni Soviet pada Desember 1991. Bubarnya salah satu negara adikuasa pada masa Perang Dingin tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan *Perestroika* yang diterapkan oleh Mikhail Gorbachev. Kebijakan *Perestroika* pada hakekatnya mencakup politik dalam negeri dan politik luar negeri yang antara keduanya berhubungan erat dan saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, di dalam negeri Uni Soviet, disamping bertujuan untuk pembenahan di bidang ekonomi, *Perestroika* juga bertujuan untuk pembaruan atau restrukturisasi dalam partai politik, Angkatan Bersenjata, dan politik luar negeri Uni Soviet. Dalam konteks politik luar negeri, *Perestroika* menekankan adanya hubungan damai dengan negara-negara Barat dan lainnya, dengan tujuan untuk menciptakan situasi internasional yang tenang, stabil, dan damai (Pradana, 2017).

Sayangnya kebijakan *Perestroika* yang diterapkan oleh Gorbachev tidak mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Uni Soviet tetap mengalami kesulitan perekonomian, sebagaimana ketika berada pada masa pemerintahan Leonid Brezhnev, Yuri Andropov, hingga Konstantin Chernenko. Kondisi memburuknya perekonomian Uni Soviet tidak dapat dilepaskan dari gagalnya penerapan ekonomi pasar. Hal ini kemudian berujung pada ketidakpercayaan rakyat Uni Soviet terhadap pemerintahan Gorbachev. Guna mengatasi masalah tersebut, Gorbachev berencana mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Republik Soviet di kota Novo-Ogaryov pada 20 Agustus 1991 guna memperbaharui perjanjian yang mengikat persatuan bangsa-bangsa yang tergabung dalam Uni Soviet. Akan tetapi perjanjian tersebut urung terlaksana ketika sekelompok penentang Gorbachev melakukan upaya kudeta pada 18 Agustus dan kemudian membentuk Komite Negara untuk Keadaan Darurat pada 19 Agustus 1991. Kudeta tersebut mendapatkan perlawanan dari Boris Yeltsin yang mendapat dukungan dari rakyat Moskow (Pradana, 2017).

Pada akhirnya upaya kudeta terhadap Gorbachev berhasil digagalkan pada 21 Agustus 1991. Keesokan harinya Gorbachev kembali ke Moskow dan kembali menduduki posisinya sebagai Presiden Uni Soviet. Pasca upaya kudeta, potensi disintegrasi dan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan pusat terus berlanjut. Pada 8 Desember 1991, Boris Yeltsin (Rusia), Leonid Kravchuk (Ukraina), dan Shushkevich (Belarusia) mengadakan pertemuan rahasia dan

mengumumkan berakhirnya Uni Soviet, serta menyetujui terbentuknya *Commonwealth of Independence States* (CIS). Pada 24 Desember 1991 Mikhail Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet, dan secara resmi Uni Soviet dinyatakan bubar pada 31 Desember 1991. Bubarnya Uni Soviet segera diikuti oleh berdirinya 15 negara baru yang sebelumnya menjadi bagian dari Uni Soviet. Negara-negara baru tersebut meliputi Rusia, Ukraina, Belarusia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Latvia, Lithuania, Estonia, Moldova, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Kirgistan (Pradana, 2017).

Sebagai negara yang sering disebut sebagai pewaris Uni Soviet, Rusia mengakui kedaulatan negara-negara bekas Uni Soviet, termasuk Ukraina. Banyak literatur menyebutkan bahwa memburuknya hubungan antara Rusia dan Ukraina dimulai pada 2005 ketika Ukraina berada dalam pemerintahan Victor Yushchenko yang pro-Barat. Ketegangan tersebut sempat memadam pada tahun 2010 ketika Viktor Yanukovich yang pro-Rusia naik sebagai presiden Ukraina, menggantikan Yuschenko. Pemerintahan Yanukovich sendiri berakhir pada awal tahun 2014, seiring dengan adanya demonstrasi *Euromaidan* yang mendesak pemerintahan Yanukovich untuk lebih pro terhadap Barat. Turunnya Yanukovich menyebabkan Ukraina terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang pertama ialah kubu yang condong terhadap Uni Eropa dan Barat. Mayoritas pendukung kubu pertama merupakan masyarakat dan politisi Ukraina yang berada di wilayah Ukraina barat dan tengah. Sedangkan kubu kedua merupakan kubu yang condong ke Rusia. Tidak seperti kubu pertama, mayoritas pendukung kubu kedua berasal dari wilayah Ukraina timur dan selatan, termasuk wilayah semenanjung Krimea (Oktorino, 2022).

Berakhirnya pemerintahan Yanukovich membuat Rusia melakukan serangkaian operasi rahasia di Krimea. Tindakan Rusia tersebut berujung pada terjadinya referendum Krimea di bulan Maret 2014. Referendum Krimea yang didukung oleh Rusia menandai lepasnya wilayah Krimea dari Ukraina. Referendum Krimea yang diikuti oleh 81,4% masyarakat Krimea. Hasil dari referendum itu menunjukkan bahwa 96,77% peserta referendum menginginkan Krimea lepas dari Ukraina dan menjadi bagian dari Rusia. Pemerintah Ukraina yang saat itu berada di bawah pimpinan Oleksandr Turchynov menganggap bahwa hasil dari referendum Krimea tidak dapat dilepaskan dari campur tangan Rusia. Begitu pula dengan negara-negara Barat yang menganggap referendum Krimea sebagai wujud aneksasi Rusia terhadap salah satu wilayah kedaulatan Ukraina (Oktorino, 2022).

Pasca referendum Krimea, kondisi politik dalam negeri Ukraina semakin memanas. Hal ini tampak dari adanya berbagai aksi protes yang dilakukan oleh kelompok pro-Rusia dan anti-pemerintah di beberapa wilayah Ukraina, tepatnya di kota-kota besar bagian timur dan selatan Ukraina pada April 2014. Sebagaimana peserta referendum Krimea, kelompok demonstran pro-Rusia menginginkan agar bagian timur Ukraina, khususnya wilayah Donbass, menjadi bagian dari Rusia. Pemerintah Ukraina kemudian merespon dengan melakukan serangan militer terhadap apa yang mereka sebut sebagai gerakan separatisme di Ukraina timur tersebut. Sayangnya berbagai serangan militer yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina justru semakin memperkuat perlawanan sengit dari kelompok pro-Rusia di Donbass. Sebagaimana masalah Krimea, Ukraina dan negara-negara Barat yang dimotori oleh AS dan UE menuding Rusia sebagai pihak yang turut campur di balik aksi separatisme kelompok pemberontak di wilayah Donbass (Oktorino, 2022).

Memasuki tahun 2015, Rusia dan Ukraina sempat mengupayakan perdamaian yang berujung pada disepakatinya Perjanjian Minsk. Perjanjian yang turut menyertakan Jerman dan Perancis sebagai mediator tersebut menghasilkan dua poin penting. *Pertama*, kedua belah pihak yakni Rusia-Ukraina diwajibkan melakukan gencatan senjata dan penarikan persenjataan berat. *Kedua*, Ukraina memiliki kontrol penuh atas seluruh zona konflik domestiknya. Sayangnya perjanjian Minsk tidak berjalan dengan lancar. Hal ini ditandai dengan tindakan Rusia yang memberikan bantuan kemanusiaan ke wilayah Donbass yang mayoritas ditempati oleh etnis Rusia. Dalam pandangan Ukraina, bantuan kemanusiaan yang diberikan Rusia merupakan upaya Rusia untuk memanfaatkan keadaan guna mencapai kepentingan nasionalnya. Berbagai infiltrasi politik yang dilakukan Rusia membuat Ukraina semakin yakin untuk berpihak pada Barat, sebagaimana tampak dari kesungguhan Ukraina agar dapat menjadi bagian dari NATO dan UE. Kesungguhan Ukraina tersebut terlihat dari amandemen konstitusi Ukraina pada Mei 2019 yang dilakukan oleh Petro Poroshenko yang saat itu menjabat sebagai Presiden Ukraina (Oktorino, 2022).

Terdapat beberapa hal yang diamandemen dalam konstitusi Ukraina. *Pertama*, perubahan isi di bagian pembukaan pada paragraf kelima yaitu dengan penambahan redaksional: “...menegaskan identitas Eropa, rakyat Ukraina tidak dapat mengubah hubungan Eropa dan NATO” (cnn.com, 2022). Penambahan redaksional tersebut bertujuan agar hubungan antara Ukraina dengan negara-negara Barat tetap terealisasikan sehingga masyarakat yang pro-Rusia tidak akan mampu mengubah segala ketetapan pemerintah yang menjabat di Ukraina. *Kedua*, perubahan pada pasal 85 ayat 5, dimana setelah amandemen, pasal 85 ayat 5 mempunyai redaksional: “Penentuan prinsip-prinsip kebijakan dalam dan luar negeri, pelaksanaan program strategis negara untuk memperoleh keanggotaan penuh di dalam Uni Eropa dan NATO” (cnn.com, 2022). *Ketiga*, perubahan pasal 102 ayat 3, dimana setelah diamandemen terdapat redaksional: “Presiden Ukraina menjamin pelaksanaan program strategis negara untuk keanggotaan penuh Ukraina di dalam Uni Eropa dan NATO”. *Keempat*, perubahan pada pasal 116 yang ditambahkan dengan redaksional: “Ukraina memastikan pelaksanaan program strategis negara untuk memperoleh keanggotaan penuh di dalam Uni Eropa dan NATO” (cnn.com, 2022).

Tidak lama setelah ditetapkannya amandemen konstitusi Ukraina, Petro Poroshenko yang menjabat sejak Juni 2014 digantikan oleh Volodymyr Zelensky yang terpilih pada 20 Mei 2019. Pada masa pemerintahan Zelensky, Ukraina tetap melanjutkan kebijakan luar negerinya yang pro terhadap negara-negara Barat. Hal ini tampak dari persetujuan Zelensky atas pembaruan dokumen “Strategi Keamanan Nasional Ukraina” pada 14 September 2020, yang secara spesifik menyebutkan bahwa tujuan akhir Ukraina adalah menjadi anggota NATO. Hal ini merupakan tindak lanjut Zelensky terhadap program *Enhanced Opportunity Partner NATO* yang telah disepakati Ukraina dan NATO sejak Juni 2020. Selanjutnya pada 24 Maret 2021, Zelensky menandatangani sebuah dekrit yang menyetujui pemberlakuan strategi de-okupasi dan reintegrasi wilayah Krimea. Tindakan Zelensky tersebut direspon Rusia dengan pengerahan 15.000 personel militer ke wilayah Krimea di sepanjang pertengahan akhir tahun 2020. Memasuki bulan September 2021, Rusia mengadakan latihan militer gabungan dengan Belarusia, dengan melibatkan 200.000 pasukan militer Rusia. Selain itu, pasca latihan militer gabungan, Vladimir

Putin tetap mempertahankan 100.000 prajurit militer Rusia di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina (Oktorino, 2022).

Guna meredakan ketegangan Rusia dan Ukraina, pada Desember 2021 Presiden AS Joe Biden menghubungi Vladimir Putin dan mengajak Presiden Rusia tersebut untuk berunding. Ajakan Biden terhadap Putin menyiratkan pesan bahwa AS menawarkan diri untuk mendengarkan segala kekhawatiran Rusia terhadap konstelasi keamanan di Eropa Timur. Alih-alih memenuhi ajakan Biden, Putin justru menganggap bahwa perundingan yang ditawarkan AS tidak akan berujung pada terciptanya jalan keluar. Lebih lanjut, Putin dengan tegas menuntut AS dan NATO untuk menjamin bahwa Ukraina tidak akan pernah menjadi anggota NATO. Pada gilirannya, tuntutan Putin tersebut ditolak oleh AS (Oktorino, 2022). Hingga akhirnya pada 22 Februari 2022, Putin menyatakan bahwa Perjanjian Minsk antara Rusia dan Ukraina tidak lagi berlaku. Dua hari berselang, Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia memulai melakukan operasi militer khusus dengan menyatakan perang terhadap Ukraina. Hingga penghujung tahun 2022, konflik antara dua negara bekas Uni Soviet yang berlangsung sejak 24 Februari tersebut belum berakhir (bbc.com, 2022).

Operasi Militer Khusus sebagai Wujud Strategi Konfrontatif Rusia Terhadap Ukraina

Jika mengacu pada teori strategi dalam pengambilan kebijakan yang dirumuskan oleh John P. Lovell, kebijakan operasi militer khusus yang ditetapkan oleh Vladimir Putin merupakan wujud dari penerapan strategi konfrontatif Rusia yang didasari oleh dua hal yaitu: persepsi ancaman terhadap niatan Ukraina bergabung dengan NATO dan superioritas kapabilitas Rusia atas Ukraina. Dari sudut pandang Rusia, tindakan operasi militer khusus terhadap Ukraina merupakan upaya agar Ukraina tidak sampai menjadi anggota NATO. Bagi Rusia, jika Ukraina sampai tergabung sebagai anggota resmi NATO, maka hal itu merupakan sebuah ancaman keamanan. Pada intinya, Rusia merasa masuknya Ukraina ke NATO bakal mengancam negara itu. Ketakutan Rusia atas ancaman serangan dari NATO bila Ukraina bergabung juga sempat disampaikan oleh Putin. Hal ini tampak dari pidato Putin sebelum berlangsungnya operasi militer khusus ke Ukraina: *"Coba bayangkan Ukraina merupakan anggota NATO dan memulai operasi militer ini. Apakah kami harus berperang dengan blok NATO? Apakah ada orang yang memikirkan hal ini? Sepertinya tidak"* (Kompas.com, 2022).

Selain itu, Putin juga menganggap bahwa jika Ukraina sampai tergabung sebagai anggota NATO, maka ancaman yang diterima oleh Rusia akan menjadi semakin besar. Hal ini terlihat dari salah satu pernyataan Putin yang menyebutkan bahwa: *"Jika Rusia menghadapi ancaman seperti masuknya Ukraina ke Aliansi Atlantik Utara, ke NATO, maka ancaman terhadap negara kita akan meningkat berkali-kali lipat"* (cnn.com, 2022). Kekhawatiran Putin terhadap niatan Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO didasari oleh anggapan negatifnya terhadap organisasi keamanan yang berdiri sejak 1949 tersebut. Menurut Putin, kekhawatirannya akan konstelasi keamanan di Eropa Timur tidak pernah mendapatkan respon yang layak dari NATO. Hal ini tampak dari pidato Putin pada Februari 2022: *"..selama 30 tahun terakhir kami telah dengan sabar berusaha mencapai kesepakatan dengan negara-negara NATO terkemuka mengenai prinsip-prinsip keamanan yang setara dan tak terpisahkan di Eropa. Menanggapi proposal kami, kami selalu menghadapi penipuan dan kebohongan sinis"*

atau upaya tekanan dan pemerasan, sementara aliansi Atlantik Utara terus berkembang meskipun ada protes dan kekhawatiran kami..” (cnbcindonesia.com, 2022).

Selain persepsi ancaman terhadap niatan Ukraina yang berkeinginan kuat untuk bergabung dengan NATO, kebijakan operasi militer khusus yang dilancarkan oleh Rusia juga didasari oleh keyakinan Rusia yang menganggap kapabilitasnya yang lebih tinggi dari Ukraina. Hal ini tampak dari pernyataan Vladimir Putin yang dengan percaya diri menyatakan menyatakan bahwa: *”...Rusia saat ini tetap menjadi salah satu negara nuklir paling kuat. Selain itu, Rusia juga memiliki keunggulan tertentu dalam beberapa senjata mutakhir. Dalam konteks ini, tidak ada keraguan bagi siapa pun bahwa calon agresor akan menghadapi kekalahan dan konsekuensi yang tidak menyenangkan jika menyerang negara kita secara langsung”* (cnbcindonesia.com, 2022).

Sebagaimana dilansir dari *Global Fire Power*, Rusia tercatat memiliki sekitar 900.000 personel militer aktif, sedangkan Ukraina hanya memiliki 196.600 pasukan. Ketidak seimbangan kekuatan militer Rusia-Ukraina terutama terletak di laut di mana Rusia memiliki 10 kali jumlah personel Angkatan laut. Selain itu, Angkatan laut Rusia mengoperasikan 74 kapal perang dan 51 kapal selam. Sedangkan Ukraina hanya memiliki dua kapal perang dan tak memiliki sama sekali kapal selam. Adapun di darat, Rusia memiliki tentara 280.000 personel. Sementara Ukraina memiliki tentara Angkatan darat sebanyak 125.600. Selanjutnya, Ukraina memiliki 900.000 personel cadangan, sedangkan Rusia memiliki jumlah yang lebih banyak yakni dua juta personel cadangan. Adapun terkait peralatan, Rusia juga jauh lebih baik dibanding Ukraina (GFP, 2022).

Tabel 1. Perbandingan Kapabilitas Persenjataan Rusia dan Ukraina

	Rusia	Ukraina
Anggaran Belanja Militer Negara	61,7 milyar dollar AS pada tahun 2020 atau 11,4% dari total anggaran.	5,9 milyar dollar AS pada tahun 2020 atau 8,8% dari total anggaran.
Personel Militer Aktif	900.000	209.000
Personel Cadangan	2.000.000	900.000
Tank	12.420	2.596
Pesawat Tempur	1.511	98
Helikopter Tempur	544	34
Artileri	7.571	2.040

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa Rusia memiliki jumlah tank tiga kali lebih banyak dibanding Ukraina, di mana jumlah tank Rusia sebanyak 12.420 sedangkan Ukraina sebanyak 2.596. Selain itu, Rusia memiliki hampir tujuh kali lebih banyak kendaraan tempur lapis baja dibanding Ukraina, yakni jumlah Ukraina sebanyak 2.870 sedangkan Rusia 19.783. Rusia juga memiliki artileri sebanyak 7.571, sedangkan Ukraina memiliki 2.040. Sementara terkait jumlah pesawat, Rusia memiliki 10 kali lipat jumlah pesawat dan helikopter. Untuk rudal permukaan yang bisa menembak pesawat, Ukraina memiliki lebih dari 400 peluncur jumlah tersebut sepersepuluh dari jumlah milik Rusia. Keunggulan Rusia selanjutnya yakni negara itu

memiliki persenjataan jarak jauh yakni memiliki lebih dari 500 peluncur rudal balistik berbasis darat (GFP, 2022).

Kesimpulan

Operasi militer khusus yang dilancarkan Rusia ke Ukraina membuat Rusia mendapatkan banyak kecaman dan sanksi dari negara-negara Barat, khususnya AS dan UE. Hal ini pada gilirannya membuat Rusia mengalami kerugian politik dan ekonomi. Jika mengacu pada aspek rasionalitas, keputusan Presiden Vladimir Putin sekilas nampak seperti suatu hal yang kurang rasional. Meskipun demikian, tindakan operasi khusus Rusia ternyata merupakan suatu bentuk strategi konfrontatif terhadap Ukraina. Strategi yang diterapkan Rusia tersebut tidak dapat dilepaskan dari persepsi ancaman Rusia terhadap Ukraina yang terus menunjukkan niatannya agar dapat tergabung dengan NATO. Selain itu, operasi militer khusus yang dilakukan Rusia juga didasari oleh anggapan Rusia yang menganggap kapabilitas militernya jauh lebih unggul dari Ukraina.

Referensi

- Ayudhia et al. 2022. "Amerika Serikat dalam Rivalitas Ukraina-Rusia: Intervensi pada Konflik Krimea dan Laut Azov". *Interdependence Journal of International Studies*. Universitas Mulawarman.
- Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buntaran, Novitasari. 2018. "Batuan Luar Negeri Sebagai Instrumen Diplomasi: Studi Kasus Bantuan Rusia Kepada Donbas Dalam Konflik Rusia-Ukraina 2014-2015". *Journal International Relations* (hlm. 420-429). Semarang: Universitas Diponegoro.
- CNBC.com. 2022. "Ini Permintaan Rusia ke NATO untuk Setop Perang Ukraina". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220302110557-4-319485/ini-permintaan-rusia-ke-nato-untuk-setop-perang-ukraina>. Diakses 12 April 2022.
- CNN.com. 2022. "Kenapa Rusia Takut Ukraina Gabung ke NATO?" <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220217114730-134-760380/kenapa-rusia-takut-ukraina-gabung-ke-nato/2>. Di akses 12 April 2022.
- GFP. 2022. "2022 Military Strength Ranking". <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>. Diakses 23 Maret 2022.
- Hanifah, Ummu RNM. 2017. "Embargo Ekonomi sebagai Strategi Konfrontasi Uni Eropa terhadap Rusia pada Masa Konflik Ukraina 2013-2015". *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 3, No. 2 (hlm. 169-175). Malang: Pusat Kajian Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kartini, Indriana. 2014. "Aneksasi Rusia di Krimea dan Konsekuensi di Ukraina". Dalam *Jurnal Penelitian Politik* volume 11 (hlm. 27 – 41). Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Kirby, Paul. 2022. "Mengapa Rusia Menyerbu Ukraina, Apa Yang Diinginkan Putin, dan Akankah Rusia Mengakhiri Perang?". <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60507911>. Diakses 14 Maret 2022.

- Kompas.com. 2022. "Serangan Rusia Ukraina. Siapa Pendukung Mereka?" <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/25/130000565/serangan-rusia-ke-ukraina-siapa-negara-pendukung-mereka?page=3> Di akses 14 maret2022
- Kompas.com. 2022. "Perbandingan Kekuatan Militer Rusia Vs Ukraina: Tentara Hingga Tank". <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/27/060000565/perbandingan-kekuatan-militer-rusia-vs-ukraina--tentara-hingga-tank?page=all> di akses 20/03/22
- Kurnia, Tommy. Penyebab perang Rusia Ukraina 2022. "Tiga Alasan Yang Jadi Penyebab Rusia vs Ukraina" <https://www.liputan6.com/global/read/4896728/3-alasan-yang-jadi-penyebab-perang-rusia-vs-ukraina>. Diakses pada 14 Maret 2022.
- Lovell, John P. 1970. *Foreign Policy in Perspective*. Holt: Rinehart and Winston.
- Mas'oeed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad, Ali. 2015. "Selamat Datang Perang Dingin! Kepentingan Rusia Di Krimea Dan Ukraina Timur Dan Ketegangan Hubungan Dengan Barat". Dalam Jurnal INSIGNIA volume 2. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muhammad et al. 2021. "Aneksasi Rusia atas Krimea, Sanksi Uni Eropa, dan Penguatan Hubungan Strategis antara Rusia-Tiongkok". Dalam Insignia Journal of International Relations volume 8. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Oktarianisa, Sefti. 2022. "Kronologi & Penyebab Mengapa Rusia Menyerang Ukraina". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220225052726-4-318218/kronologi-penyebab-mengapa-rusia-meny Serang-ukraina/2>. Diakses 14 Maret 2022.
- Oktorino, Nino. 2022. *Ukraina: The Road to Armageddon*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pradana, Hafid Adim. 2017. "Rasionalitas Rusia-NATO Dalam Perencanaan Kerjasama Rudal Tahun 2010." Prosiding Semnas UMM, hlm. 931-943.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Sorongan Patrio T. 2022. "Simak! Alasan Lengkap Putin Mengapa Serang Ukraina". Simak! Alasan Lengkap Putin Mengapa Serang Ukraina (cnbcindonesia.com). Diakses 19 Januari 2023.